**ABSTRAK**

Pajak Daerah khusunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) saat ini menjadi primadona bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelimpahan PBB P2 menjadi pajak daerah di Kabupaten Trenggalek dilakukan pada Tahun 2014. Namun pada pelaksanaan pelimpahan tersebut tidak disertai dengan data yang lengkap, salah satunya adalah data tentang piutang PBB P2. Setelah resmi menjadi pajak daerah, salah satu kewajiban Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah mengelola data piutang PBB P2 dari pusat tersebut. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang PBB P2 di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, untuk mengetahui hambatan yang dialami Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam mengelola piutang PBB P2, dan untuk mengetahui upaya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek mengatasi hambatan yang ada dalam mengelola piutang PBB P2. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam Laporan Akhir ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengelolaan Piutang PBB P2 di Kabupaten Trenggalek pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik apabila ditinjau dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian menurut teori Manajemen Pajak dari Sophar Lumbantoruan sebagaimana yang dikutip penulis dari internet ([www.e-akuntansi.com](http://www.e-akuntansi.com)). Namun pelaksanaan pengelolaan piutang PBB P2 oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek masih belum optimal. Hambatan yang di alami oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam mengelola piutang PBB P2 adalah kurang lengkapnya data piutang PBB P2, adanya piutang semu, dan adanya perbedaan data Sistem Manajamen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dengan data di lapangan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan validasi data piutang PBB P2, konfirmasi ke Wajib Pajak dan Bank Jatim, pemutakhiran data lapangan, dan pembaharuan data SISMIOP.

Kata Kunci : 1. Pengelolaan;

2. Piutang PBB P2; dan

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**ABSTRACK**

Regional Taxes, especially Land and Rural Land and Urban (PBB P2) Taxes are currently the primadona of the region to increase Original Regional Income (PAD). The transfer of PBB P2 to local tax in Trenggalek Regency was done in the Year 2014. However, in the implementation of the delegation is not accompanied by complete data, one of which is the data about receivable PBB P2. After officially become a local tax, one of the obligations of Trenggalek Regency Government is to manage data of PBB P2 receivable from the center. The purpose of the authors to conduct this research is to find out how the management of PBB P2 receivable in the Regional Finance Agency of Trenggalek Regency, to know the obstacles that experienced by the Regional Finance Agency of Trenggalek Regency in managing the PBB P2 receivable, and to know the efforts of the Regional Finance Agency Trenggalek overcome the existing obstacles in managing PBB P2 accounts. The research method used by the author in this Final Report is a qualitative research method that is descriptive with inductive approach. The Management of Accounts PBB P2 Receivable in Trenggalek Regency has been implemented well in terms of planning, implementation and control according to Tax Management theory from Sophar Lumbantoruan as quoted by the author of internet (www.e-akuntansi.com). However, the implementation of the management of PBB P2 receivable by the Regional Finance Agency of Trenggalek Regency is still not optimal. The obstacles experienced by the Regional Finance Agency of Trenggalek Regency in managing the PBB P2 accounts are lack of complete data of PBB P2 receivable, the existence of pseudo receivables, and the difference of data of Management Information System of Tax Object (SISMIOP) with data in the field. The effort made by the Regional Finance Agency of Trenggalek Regency in overcoming these obstacles is to validate data of PBB P2 receivables, confirmation to Taxpayers and Bank Jatim, updating field data, and updating of SISMIOP data.

Keywords: 1. Management;

2. PBB P2 Receivables; and

3. Original Regional Income (PAD)